

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Partai Politik**

##### 1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Sigmund Neumann (dalam Prof. Miriam Budiardjo, 2008 hlm. 404) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other groups holding divergent views*).

Sejalan dengan pengertian partai politik diatas, Undang-Undang Nomor 2 ayat 1 Tahun 2011 tentang partai politikpun juga menjelaskan bahwa “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari penjelasan ahli dengan dikaitkan Undang-undang yang menjelaskan mengenai partai politik di Indonesia. Maka penulis pun berpandangan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisasi dan setiap

anggota-anggotanya memiliki orientasi dan kemampuan masing-masing, serta mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki seseorang yang dilakukan secara berkesinambungan dan melalui berbagai cara secara konstitusional atau melalui pemilihan umum dengan memperoleh dukungan rakyat untuk menjadi wakil rakyat dengan berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

## 2. Tujuan Partai Politik

Dibentuknya partai politik di berbagai Negara mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan cita-cita dari partai politik tersebut yang diinginkan, tujuan partai politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 10 Tahun 2011 tentang partai politik, tujuan umum partai politik meliputi :

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan umum partai politik, tidak terlepas dari tujuan khusus partai politik meliputi :

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat,
- c. berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 3. Fungsi Partai Politik

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 pasal 11 tahun 2011 tentang fungsi partai politik, penjelasan tentang fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik di negara demokrasi seperti di Indonesia terbagi menjadi empat bagian yaitu: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*) (Miriam Budiardjo 2008, hlm 405-409). Penjelasan dari empat fungsi partai politik sebagai berikut:

#### a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia politik. Jika dilihat dari segi ini, tugas yang dimiliki partai politik adalah Sebagai penyalur berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan ditampung dan disatukan menjadi satu kesatuan guna menghasilkan tujuan yang sama. Proses tersebut dinamakan *interest aggregation* atau penggabungan kepentingan dan sebagai perantara penyebarluasan kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah kepada warga negaranya. Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai pendengar bagi pemerintah dan bertindak sebagai peneras suara bagi warga negara.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan usaha untuk mentransmisikan budaya politik dalam upaya membentuk sikap dan orientasi setiap anggota masyarakat selaku warga negara. Atau dengan kata lain, ini merupakan suatu pendidikan politik, dimana partai politik merupakan struktur penting dalam menanamkan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dalam fungsi ini, partai politik akan berusaha memasyarakatkan berbagai visi, ide, serta kebijakan-kebijakan strategis yang dimilikinya guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yaitu berupa dukungan.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik ikut serta dalam upaya memperluas partisipasi politik bagi warga negara, dimana ia merupakan suatu wahana untuk dapat melakukan penyeleksian kader-kader yang nantinya akan memimpin negara pada tingkat maupun posisi jabatan tertentu yaitu dengan berusaha melakukan pencarian serta mengajak warga negara yang memiliki bakat untuk menjadi anggota partai politik untuk ikut serta dalam kegiatan partai. Setelah mereka masuk ke dalam keanggotaan partai, maka partai politik akan melakukan pembinaan serta mendidik kader-kader baru tersebut untuk menggantikan kader-kader yang lama.

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi persaingan maupun beda pendapat yang terjadi pada masyarakat dalam suatu sistem demokrasi, dimana nilai-nilai dan kepentingan yang tumbuh dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki berbagai keanekaragaman, rumit, serta cenderung terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya. Suatu negara yang memiliki jumlah partai politik yang banyak dimana setiap partai menawarkan ideologi, program, serta kebijakan-kebijakan alternative yang berbeda-beda, maka melalui polarisasi partai politik tersebut beraneka ragam kepentingan masyarakat dapat disalurkan.

#### 4. Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik

Perlu adanya peningkatan kualitas terhadap proses perekrutan dan seleksi para kader sehingga para individu kader dalam partai tersebut telah memiliki bekal yang cukup untuk dapat bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan pada akhirnya masyarakat dapat memberikan dukungan yang nyata bagi partai. Dalam hal ini, masyarakat menekankan kepada komitmen bersama para pimpinan partai agar dapat konsisten untuk berusaha mendapatkan dukungan rakyat dengan menampilkan hal-hal yang bernilai moral, etika, dan patuh akan hukum dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat tidak pragmatis karena kita semua wajib menciptakan iklim politik yang baik serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tak bisa dipungkiri fenomena minimnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol adalah problem serius yang harus segera diatasi. Untuk memberikan solusi terhadap problem ini terlebih dahulu harus dipahami dengan jelas apa yang menjadi akar dari problem ini apakah problem ideologinya, ikatan antar orang-orang di partai, atau justru kualitas orang-orang yang bergabung di dalamnya, beberapa hal tersebut yang sebenarnya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Ketika masyarakat tidak mengetahui secara baik tentang sebuah partai maka mereka tidak akan ikut serta. Walaupun partai politik mempunyai peran yang positif akan tetapi masyarakat dalam menentukan pilihannya lebih memilih pasangan calon yang mempunyai popularitas yang baik dalam pandangan masyarakat bukan melihat dari partai politik yang mengusung calon-calon tersebut.

#### 5. Masalah Yang Dihadapi Partai Politik

Sebagaimana definisi tentang partai politik yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kita memperoleh sebuah informasi mengenai eksistensi dari partai politik sebagai sebuah instrument politik untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi permasalahan kemudian muncul ketika individu-individu yang terdapat dalam partai politik hanya berorientasi pada bagaimana cara untuk memperoleh kekuasaan tersebut, sehingga kekuasaan menjadi muara

akhir dari kontestasi politik yang dikejar oleh partai politik. Sehingga makna luhur dari aktivitas politik yang lebih menekankan aspek fungsional dari politik menjadi terbengkalai, yakni melakukan pemeliharaan atau pengaturan terhadap berbagai macam urusan umat.

Aktivitas partai politik hanya berhenti pada level bagaimana cara memperoleh kekuasaan, padahal seharusnya tidak demikian, namun harus dilengkapi pula dengan bagaimana kekuasaan yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kondisi demikian mengakibatkan “syahwat” politik untuk berkuasa yang dominan, bukan semangat “pengabdian” terhadap masyarakat. Disisi lain terjadi sebuah alienasi partai politik terhadap masyarakat sehingga berakibat pada timbulnya jarak dan kesenjangan antara partai politik dengan masyarakat. Jarak yang besar ini membuat masyarakat mulai berfikir bahwa mereka bisa hidup tanpa partai politik. Yang paling menyedihkan adalah kekecewaan begitu mendalam di masyarakat karena mereka merasa tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh partai politik. Hal ini jelas akan menurunkan angka partisipasi politik masyarakat, yang nantinya akan tercermin dari meningkatnya jumlah Golput.

Sunatra (2016, hlm. 358) selain hal tersebut ada dua faktor-faktor yang dihadapi partai politik yaitu : 1). Faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor dari masyarakat, dimana masyarakat masih banyak yang mempunyai gambaran bahwa berhubungan dengan negara, maupun partai politik adalah gambaran buruk. Masyarakat masih mempunyai citra yang buruk tentang partai politik, selain itu juga gambaran partai politik hanya melulu mengejar kekuasaan dan bila sudah berkuasa banyak yang melakukan penghianatan terhadap amanat rakyat, misalnya korupsi atau kongkalikong dengan pihak kapitalis yang merugikan rakyat. 2). Faktor internal. Faktor ini berasal dari sikap partai sendiri. Hasil analisis menunjukkan partai masih bersifat tertutup dan cenderung berorientasi kepada kepentingan sendiri. Dimana sistem rekrutmen masih dipengaruhi oleh mekanisme yang tidak baik dan tidak teratur.

## B. Pendidikan Politik

### 1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembudayaan cita-cita politik, norma-norma, nilai dan kaidah dari sistem politik. Para ahli ilmu politik memberikan definisi tentang pendidikan politik, Alfian menyatakan, pendidikan politik dalam arti sempit didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi, nilai-nilai dan praktek-praktek politik oleh agen-agen tertentu yang secara formal bertanggungjawab akan hal tersebut. Dalam arti luas pendidikan politik meliputi semua *political learning* baik formal maupun informal, secara berencana maupun tidak berencana, secara langsung atau tidak langsung pada setiap siklus hidup manusia. Pendidikan politik meliputi *political education, political socialization, citizenship training* untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Atau dengan kata lain pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan rakyat, meningkatkan kesadaran warga negara dalam berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab, sehingga warga negara melek politik. (Sunatra, 2016, hlm. 12).

Menurut Ramlan Surbakti (dalam Dr. Sunatra, SH., MS., 2016, hlm. 43) memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999) berpendapat sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Ini sejalan dengan pendapat Robert E Lane (1969) dalam *Political Thinking and Conciousness: The Private Life of the Political Mind*, penanaman nilai-nilai tersebut mutlak dilakukan bagi warga negara dan menjadi kewajiban pemerintah melaksanakan hal tersebut untuk menjaga sistem politik. Hal itu diperkuat oleh David Easton dan Jack Dennis (1973)

dalam *Childern in the Political Sistem*, yang menekankan perlunya sosialisasi politik sejak dini kepada peserta didik, terutama penanaman hal –hal yang fundamental, seperti ideologi politik, konstitusi dan sistem politik.

Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu (Budiardjo, 2008, hlm. 15).

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar mengenai pentingnya ikut dalam kegiatan politik dan berkepribadian politik, agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab.

Dari kedua penjelasan tadi, penulis merumuskan pengertian pendidikan politik ialah bentuk pendidikan intensional dan sistematis untuk mempengaruhi individu, agar lebih efektif lagi dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik, dan memiliki tanggung jawab ethis yang tinggi dalam setiap kegiatan politiknya. Maka yang diperlukan bukan hanya melancarkan proses-proses politik saja, akan tetapi justru ada kegiatan politik warganegara dan pertanggungjawab politiknya untuk ikut mengatur masyarakat dan negara atau pemerintahan, menuju kehidupan sejahtera (Sukarno). Jadi, pendidikan politik dimaknai sebagai suatu usaha sadar dan terencana dari seseorang untuk menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada orang lain yaitu dari orang dewasa kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantapkan orientasinya terhadap politik. Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan ini diharapkan para generasi muda mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan perpolitikan dalam bangsa dan negara



sehingga muncullah kader-kader muda yang lebih kompeten dalam memperjuangkan politik bangsa secara demokratis dan mampu bertanggung jawab secara etis dengan dimilikinya kesadaran politik yang dimiliki para pemuda tersebut.

## 2. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik menurut Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda adalah menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar menjadi sadar akan politik dan lambat laun akan mengembangkan bakat dan minat seseorang untuk ikut serta berpartisipasi di dunia politik dan mampu bersaing secara positif, kritis, kreatif serta bertanggung jawab dan berpedoman penuh pada Pancasila dan UUD 1945.

“Pendidikan politik berkaitan erat dengan pendidikan nasional mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, membuat rakyat (individu, klien, anak didik, dan warga masyarakat) mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik secara tanggung jawab dan kritis terhadap konflik yang terjadi. Kedua, menampilkan peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara dengan mengembangkan semua bakat, potensi dan kemampuannya (pengetahuan, sikap, wawasan dan keterampilan) agar ia dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara. Khusus bagi generasi muda, tujuan pendidikan politik bagi generasi muda adalah: (1) membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik dan sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam sejumlah sifat watak atau karakteristik kepribadian Indonesia” (Kartono, 1989).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan politik dewasa ini sangat didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses informasi, hal ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dunia politik bahkan para aktivis partai politik sehingga kecurangan-kecurangan dan elite politik tidak dapat menggunakan kekuasaannya dengan bebas dan memonopoli para kaum muda yang masih rentan terhadap sikap pragmatisme dan materialistis (Firmanzah, 2007, hlm 49), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini semakin memudahkan seseorang untuk mengakses informasi politik secara detail dari media massa ataupun media elektronik yang dapat di terima oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan dan cacat hukum dari kegiatan politik.

Tujuan pendidikan politik pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan kepada individu ataupun kelompok mengenai betapa pentingnya sebagai anggota warga negara untuk ikut serta dalam penyusunan pemerintahan dan aktif dalam berbagai kehidupan politik yang ada melalui hal-hal kecil, misalnya dengan menjadi anggota partai (kader), ikut serta memberikan suara dalam kegiatan pemilihan umum, ataupun menjadi peserta kampanye suatu partai politik. Pendidikan politik dapat membentuk warga negara yang mempunyai sikap kritis, aktif dan mampu melaksanakan aktifitas-aktifitas politik secara benar dan terhindar dari kecurangan-kecurangan aktifitas politik.

### 3. Bentuk Pendidikan Politik

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di masyarakat suatu daerah terlebih khusus di kalangan pemuda. Bentuk

pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira (2004, hlm. 56), dapat diselenggarakan melalui :

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
- b. Siaran radio dan televisi serta film (Audio Visual Media)
- c. Lembaga-lembaga asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat untuk menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun non-formal.

Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua yang disuguhkan diatas sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Aspek terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah ataupun sasaran yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terkait masalah politik.

#### 4. Pendidikan Politik dilingkungan Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bisa melihat para pemimpin dan wakil-wakil rakyat di Negara kita terpilih melalui partai politik, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah baik dalam pemilihan legislatif di tingkat DPR Pusat, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II, maupun pada pemilihan pimpinan eksekutif baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan atau Walikota. Dalam Undang-Undang tentang partai politik yang selama ini diberlakukan di Indonesia, secara umum selalu dicantumkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik. Namun pelaksanaan fungsi ini relatif sangat kurang maksimal dijalankan oleh partai politik. Semua partai masih memprioritaskan fungsi partai sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan saja. Padahal disetiap partai manapun yang ada di Indonesia, baik didalam AD dan ART, program umum, visi misi dan maupun kebijakan lainnya selalu ditekankan bahwa ada kewajiban partai untuk melaksanakan pendidikan politik, terutama terhadap kadernya.

Salah satu hambatan tidak berjalannya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik ini dikarenakan minimnya sumber dana yang dipunyai oleh partai politik. Hal ini terjadi karena persepsi kalangan partai terhadap pendidikan politik hanyalah sebatas pendidikan politik dalam bentuk formal semisal pendidikan dan pelatihan kader, seminar, diskusi politik dan sebagainya yang diselenggarakan secara formal. Untuk melaksanakan pendidikan politik semacam itu memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, maka persepsi tentang bentuk pendidikan politik itu sendiri harus dirubah. Dalam pelaksanaan aktivitas kepartaian pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk formal tetapi juga dalam bentuk-bentuk nonformal. Bentuk-bentuk pendidikan politik yang dapat dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya, diantaranya yaitu: pelaksanaan rekrutmen anggota dengan pola seleksi, pelatihan kepemimpinan dan manajerial partai pelaksanaan diskusi politik, pelaksanaan rapat rutin partai, pemberian kesempatan pada kader baru dan kader muda untuk menempati posisi sebagai pengurus partai pemberian kesempatan kepada kader untuk dicalonkan dalam jabatan legislatif maupun eksekutif melalui mekanisme seleksi mengikutsertakan kader dalam seminar, pelatihan, diskusi diluar partai pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan terhadap kader memberikan informasi terbaru terhadap kadernya dan mendirikan organisasi sayap partai.

#### 5. Masalah Yang Dihadapi Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik

- a. image buruk partai politik yang berkembang dimasyarakat sehingga partai politik sulit untuk melakukan sosialisasi politik untuk masyarakat karena, masyarakat sudah tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut
- b. sumber daya manusia dalam partai politik tersebut kurang mumpuni, sehingga partai politik tidak dapat menentukan atau mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan elektabilitas dan partisipasi masyarakat terkait pendidikan politik

- c. kurangnya komitmen dari petinggi partai dalam bidang pendidikan politik sehingga menimbulkan kesan bahwa partai politik lebih mementingkan kekuasaan.

### C. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

#### 1. Sejarah Partai GERINDRA

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,” kata Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: *“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”* Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru.

Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik

sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli. Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (*Institute for Policy Studies*) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu. Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut.

Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto. Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan.

Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Nah, Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Mengangkat harkat dan martabat rakyat dari keadaan melarat.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) didirikan tanggal 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali

harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

2. Tujuan didirikannya partai GERINDRA ialah :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945;
- b. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan;
- e. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

3. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.



### Misi

- a. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- b. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- c. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- d. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
- e. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

#### 4. Prinsip Dasar Partai GERINDRA

Dalam mewujudkan visi dan misi, Partai GERINDRA mengacu pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

##### a. Prinsip Disiplin

Disiplin merupakan prinsip dasar dari seluruh perjuangan Partai GERINDRA dalam mencapai tujuan bersama. dengan disiplin, seluruh sumber daya terfokus dan terorganisir sehingga mencapai usaha maksimal. Dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, partai GERINDRA senantiasa mengedepankan disiplin dalam setiap gerak dan langkah.

##### b. Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan merupakan perwujudan sejati dari sebuah kemerdekaan, yang meliputi kedaulatan atas diri sendiri, keluarga,

masyarakat, bangsa, dan negara. Menghargai dan menghormati kedaulatan setiap entitas merupakan landasan penting dalam tata pergaulan sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai GERINDRA bersikap dan bertindak berdasarkan penghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan setiap individu serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa.

c. Prinsip Kemandirian

Kemandirian dimaknai sebagai bekerja dan berkarya berdasarkan kemampuan diri sendiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Kemandirian juga dimaknai sebagai manifestasi dari kepercayaan diri dan penghargaan atas diri sendiri serta menempatkan setiap individu sebagai entitas yang memiliki kemampuan dan karya. Partai GERINDRA bersikap dan bertindak berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta menghargai kemandirian setiap individu.

d. Prinsip Persamaan Hak

Dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki persamaan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tak ada yang dikecualikan dan dibedakan haknya, kecuali dikarenakan oleh karya dan kerja individu itu sendiri. Partai GERINDRA bersikap dan bertindak dengan mengedepankan persamaan hak setiap individu dan mengembangkan sikap anti diskriminasi.

e. Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong

Sikap kerjasama dan gotong royong yang dilandasi oleh penghormatan atas kedaulatan, kemandirian, dan persamaan hak dalam mengerjakan dan menuntaskan sebuah pekerjaan sejatinya merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada individu yang bisa hidup tanpa membutuhkan individu lain. Partai GERINDRA sangat menyadari pentingnya kerjasama, karena itu dalam setiap sikap dan tindakan, partai GERINDRA mengedepankan dan mengembangkan kerjasama dan gotong royong dengan entitas

masyarakat lainnya sebagai landasan pergaulan berbangsa dan bernegara.

f. Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang luhur. Musyawarah memberikan penghormatan kedaulatan individu dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Musyawarah harus dijadikan jalan utama dalam memecahkan setiap permasalahan sehingga tidak memunculkan konflik dan kebuntuan. Partai GERINDRA menjadi garda terdepan dalam pelestarian nilai-nilai musyawarah dengan mengembangkan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan bangsa.

5. Pokok-pokok perjuangan partai GERINDRA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan berpegang teguh pada nilai dasar dan prinsip dasar, partai GERINDRA memiliki pokok-pokok perjuangan yang akan dilaksanakan dan diperjuangkan dalam berbagai kebijakan nasional secara konstitusional, antara lain :

a. Bidang Politik

Partai GERINDRA akan memperjuangkan reformasi sistem politik Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 dan jati diri bangsa. Sistem politik yang mengarah pada demokrasi liberal sejak era reformasi perlu dikoreksi. Demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi liberal telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional yang kontraproduktif bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Demokrasi yang tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia telah menjauhkan cita-cita kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat semakin ditinggalkan dan menjadi obyek perebutan wacana. Tapi realitas kehidupan rakyat yang sesungguhnya justru semakin terjerat penderitaan. Kondisi ini semakin kurang kondusif karena faktor kepemimpinan nasional yang tidak kuat. Lemahnya kepemimpinan nasional merupakan faktor penentu yang menyebabkan kemerosotan

kehidupan bangsa di berbagai bidang, di samping terdapat faktor-faktor lain. Masa depan sebuah bangsa dapat dilihat dari kualitas pemimpinnya. Baik pada visi yang dimiliki maupun pada karakter pribadinya.

Lemahnya sosok pemimpin sebuah bangsa, dapat memunculkan banyak dampak negatif terhadap kebijakan strategis. Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat (*strong leadership*) yang dapat memulihkan kehidupan ekonomi rakyat dan mengangkat martabat bangsa dalam pentas internasional. Karakter ini hanya akan dimiliki oleh pemimpin yang lahir dari rahim pergerakan. Pada sisi lain, kepemimpinan nasional Indonesia mendatang adalah kepemimpinan yang secara ideologis dapat dipertanggungjawabkan dalam arti menghayati, mengamalkan, dan memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai amanat dan cita-cita suci bangsa yang dinyatakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kepemimpinan nasional Indonesia harus mempunyai kemampuan dan pengalaman manajemen pembangunan sehingga Indonesia dapat dijalankan secara terencana, terukur, terkendali, dan terarah. Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apalagi dunia akan menghadapi krisis pangan dan energi yang dapat memicu resesi.

Kepemimpinan nasional Indonesia mendatang secara politik harus memiliki kemampuan bertindak dan memutuskan dengan paramater Pancasila dan UUD 1945 serta kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Sehingga memberi kejelasan kepada rakyat kearah mana bangsa Indonesia melangkah. Kepemimpinan nasional Indonesia mendatang harus dapat memberikan kemantapan secara ideologis dan politis kepada rakyat dan tidak membiarkan rakyat berdiri diambang keraguan menghadapi tantangan-tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Kepemimpinan nasional Indonesia harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dalam bidang demokrasi pada satu sisi, dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

pada sisi yang lain. Cita-cita demokrasi harus dilaksanakan didalam kerangka keutuhan NKRI.

Kepemimpinan nasional Indonesia mendatang harus mempunyai komitmen menjaga moral bangsa, dan mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan lainnya. Untuk menciptakan kepemimpinan nasional seperti dimaksud, partai politik memiliki peran penting. Partai politik adalah sarana rekrutmen kepemimpinan nasional yang mampu menghantarkan Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Institusionalisasi partai melalui pengakaran basis akar rumput, penguatan legitimasi, pembuatan aturan main, dan peningkatan kemampuan partai dalam pemerintahan menjadi prasyarat dasar bagi partai politik yang kuat yang dapat menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat dan legitimate. Partai GERINDRA akan memperjuangkan tatanan politik nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi, UUD 1945. Yakni, penerapan sistem pemerintahan presidensil murni, kemandirian dan keterkaitan fungsional antara lembaga tinggi negara yang sehat dan tidak saling menjatuhkan, serta pembenahan lembaga, badan, atau komisi yang dibentuk dan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Dalam pandangan partai GERINDRA, sistem dan tatanan politik yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang dilaksanakan secara konsekuen. Terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang memberikan kebebasan sebeb-bebasnya, kini bangsa kita tengah menghadapi pilihan, mana yang diutamakan, kemakmuran rakyat atau kebebasan yang sebeb-bebasnya. Menghadapi pilihan itu, Partai GERINDRA akan mengutamakan kemakmuran rakyat sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Demokrasi dan kebebasan hanya merupakan salah satu alat, sedang tujuan utama kita berbangsa dan bernegara adalah kemakmuran rakyat.

b. Bidang Ekonomi

Kebijakan perekonomian harus mendukung cita-cita *welfare state* (negara kesejahteraan) yang berkeadilan. Untuk itu diperlukan langkah yang tepat untuk menormalisasi kehidupan ekonomi rakyat dengan kembali memperjuangkan paham ekonomi kerakyatan. Sejak era orde baru, ekonomi Indonesia cenderung berwatak kapitalistik.

Meskipun tumbuh dengan stabil, pemerataan masih menjadi isu utama. Angka kemiskinan absolut dan pengangguran memang berhasil dikoreksi dengan baik, namun liberalisasi ekonomi pada Tahun 1980-an telah menyebabkan Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi 1997-1998 merupakan buah liberalisasi yang didorong oleh kekuatan-kekuatan organisasi dana moneter internasional (IMF) sehingga pembangunan Indonesia mengalami kemunduran bertahun-tahun.

Keadaan ekonomi di era reformasi bertambah buruk. Identitas liberal-kapitalistik semakin nyata dan terbukti dengan berbagai produk aturan yang liberal. Kendali kebijakan ekonomi tetap ditangan ekonom yang bermazhab neoliberal yang memasarkan resep konsensus Washington dengan privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Privatisasi dilakukan dengan menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pihak asing.

Kemudian peran pemerintah/negara dalam ekonomi semakin dikikis dan diserahkan pada mekanisme pasar sebebaskan-bebasnya karena dianggap distorsi terhadap pasar. Liberalisasi dilakukan dengan menghilangkan proteksi dan subsidi. Selanjutnya, investasi asing masuk dengan fasilitas yang mudah dan luas tanpa kendali. Keadaan ini telah menciptakan dominasi asing dalam kepemilikan unit ekonomi. Ekonomi rakyat makin tersisih. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Terjadi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, tidak ada pemerataan. Pembangunan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Sistem ekonomi liberal-kapitalistik harus dikoreksi karena gagal mensejahterakan rakyat.

Partai GERINDRA memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Kebijakan perekonomian harus berdasar pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), sebagai ruh dari setiap kebijakan ekonomi. Karena itu kepemilikan negara terhadap alat-alat perekonomian dan kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dipertahankan, dan diusahakan pengembalian seluruh alat-alat perekonomian dan kekayaan yang telah berpindah kepemilikan terutama yang erat kaitannya dengan keamanan nasional. Partai GERINDRA akan mengembangkan koperasi sebagai bangunan ekonomi yang ideal pada dataran mikro dan makro.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian, sebagai prinsip dasar susunan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan bentuk nyata dari usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi harus dihidupkan dan digerakkan sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Partai GERINDRA menempatkan koperasi sebagai model ideal susunan perekonomian Indonesia dengan sebuah harapan yang kuat untuk menghilangkan corak individualistik dan kapitalistik dari wajah perekonomian Indonesia.

Sebagai negara agraris, prioritas pembangunan ekonomi harus lebih banyak dicurahkan pada sektor pertanian, sebagai sektor profesi terbesar bangsa ini. Dalam konteks ini diperlukan penataan untuk menyelesaikan masalah-masalah klasik disektor pertanian seperti pengadaan pupuk, benih, lahan, infrastruktur, modal dan pemasaran hasil pertanian. Kebijakan terintegrasi yang berpihak pada petani akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju dan sebagai bangsa kita akan berdaulat secara pangan. Potensi ekonomi lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor kelautan.

Tiga perempat wilayah Indonesia merupakan lautan dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada. Identitas kita sebagai negara maritim perlu diperkuat dengan menjadikan laut sebagai lahan penghidupan rakyat. Perlu ditata ulang hubungan petani dan tanah, hubungan pekerja dan industri, hubungan penjaja dan pasar, hubungan

nasabah dan perbankan. Dunia usaha harus digairahkan. Pemerintah melindungi dunia usaha. Monopoli harus dicegah, baik dalam sektor industri maupun distribusi. Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha harus dilindungi dari praktek monopoli dan konglomerasi.

Tak dapat dihindari pembangunan membutuhkan biaya. Penerimaan negara dari pajak harus lebih ditingkatkan dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak bahwa dana pajak akan dikembalikan untuk pembangunan. Selama ini biaya pembangunan sedikit banyak tergantung pada pinjaman lunak dan hibah. Mekanisme hutang luar negeri yang sering digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan, telah menjadi kebiasaan buruk.

Hutang telah menjadikan negara ini tidak berdaulat secara ekonomi. Setiap kebijakan ekonomi pemerintah tak lepas dari kontrol asing sebagai donatur. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, perlu renegotiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya diberbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat.

Partai GERINDRA menolak peminjaman hutang luar negeri baru karena akan menambah beban rakyat melalui APBN hal lain yang perlu dilakukan adalah penarikan modal asing kedalam negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) diluar sektor-sektor hilir (bukan terkait kekayaan alam). Untuk itu diperlukan stabilitas politik, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan produksi termasuk tersedianya pekerja yang berkualitas. PMA perlu diatur sehingga mendukung pembangunan bukan menguasai ekonomi nasional. Partai GERINDRA mendukung dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya wirausaha/wiraswasta (*entrepreneur*) khususnya usaha kecil dan menengah. Wujud dukungan tersebut termasuk kredit mikro dan pengurangan jumlah



izin dan aturan yang dapat menghambat investasi dan dunia usaha. Birokrasi pemerintahan harus dikurangi agar iklim usaha yang kondusif dapat tercipta. Sementara itu, globalisasi berwatak neoliberal yang kini melanda dunia, perlu disikapi secara kritis.

Di bidang ekonomi, globalisasi belum menguntungkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Perdagangan dunia tetap dikuasai negara-negara maju tertentu. Dalam globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia hanya menjadi pasar, obyek dari sebuah sistem ekonomi dunia yang tidak berimbang.

Karenanya, partai GERINDRA senantiasa berpegang teguh pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, dan menolak setiap sistem ekonomi yang jelas-jelas merugikan dan menyengsarakan rakyat. Partai GERINDRA menolak bentuk liberalisasi perdagangan seraya mengedepankan kebijakan proteksi bagi komoditas perdagangan dalam negeri. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang kini diterapkan Indonesia baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, berpangkal pada kontrol kuasa ekonomi asing terhadap Indonesia. Indonesia dan negara-negara berkembang dipaksa mencabut subsidi terhadap berbagai komoditas strategis sehingga memungkinkan bagi produk yang akan datang dari negara lain, dalam hal ini negara maju seperti AS dan Uni Eropa, bisa bersaing bebas.

Namun di sisi lain, negara-negara maju tersebut menerapkan kebijakan subsidi bagi produksi komoditas mereka untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Partai GERINDRA mendukung dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang yang syarat kepentingan asing seperti UU Penanaman Modal dan UU Migas. Terkait privatisasi, partai GERINDRA menolak kebijakan privatisasi atas BUMN. BUMN sebagai organ taktis bisnis negara memiliki peran yang signifikan dalam menambah pemasukan negara serta pelayanan kepada masyarakat. Eksistensi BUMN merupakan wujud kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya

produksi yang ada di negara ini. BUMN harus efisien, efektif, dan bukan menjadi sapi perah dari korupsi struktur birokrasi negara.

Karena itu, BUMN harus dikelola oleh manajemen yang profesional dan tidak menjadi tempat penampungan penempatan politik. Partai GERINDRA menyetujui partisipasi modal swasta, modal dalam negeri maupun asing, didalam susunan modal perseroan-perseroan BUMN, berupa investasi pasif (*portfolio investment*). Dengan demikian, BUMN yang memerlukan tambahan modal akan tetap dikendalikan oleh pemerintah selaku pemegang saham penentu (*controlling shareholder*) dan saham pemerintah merupakan "*Golden Share*".

Pemodal swasta dalam negeri maupun asing tetap sebagai investor pasif. Partai GERINDRA menuntut adanya pengajuan penghapusan hutang luar negeri yang dikorup (*odius debt*). Hutang luar negeri adalah sumber masalah. APBN yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum, dialokasikan membayar hutang. Sementara alokasi lain seperti pendidikan dan kesehatan mendapat jatah yang kecil. Padahal kebijakan peminjaman hutang oleh pemerintahpun seringkali tidak tepat guna bahkan banyak dikorupsi para pejabatnya sendiri. Permohonan penghapusan hutang luar negeri merupakan cara legal dan sah untuk mengurangi beban hutang dan tak akan membuat citra buruk Indonesia di dunia Internasional. Cara ini dilakukan negara-negara lain. Karena itu, langkah penghapusan hutang luar negeri yang dikorup adalah langkah strategis agar penggunaan APBN sebagai dana rakyat bisa maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Partai GERINDRA memandang perlunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai perencanaan, arah dan ukuran pembangunan ekonomi. Amandemen UUD 1945 (1999-2002) telah menyederhanakan tugas MPR dengan tidak diberikan wewenang dalam menyusun GBHN. Lebih buruk lagi, penyusunan GBHN tidak dilimpahkan kepada lembaga tinggi negara manapun. Sehingga

pembangunan ekonomi Indonesia berjalan tanpa perencanaan jangka panjang.

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah penduduk miskin Indonesia (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) masih relatif tinggi baik menurut ukuran BPS maupun standar internasional. Sebagian besar penduduk miskin tinggal didaerah pedesaan. Jumlah pengangguran pun tetap tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa ini. Bahkan di era reformasi, kemiskinan sudah berubah wujud menjadi bentuk kemiskinan yang sistemik. Dalam hal ini kemiskinan adalah hasil dari kegagalan pemerintah dalam mengatur negara. Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Penciptaan lapangan kerja harus ditingkatkan sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan merupakan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Partai GERINDRA menjadi garda terdepan dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, petani, warga terbesar direpublik ini, dengan hanya memiliki lahan rata-rata 0.3 hektar telah dihimpit oleh kemiskinan struktural.

Nilai tukar petani (*term of trade*) yang fluktuatif menyebabkan pendapatan para petani tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan. Partai GERINDRA akan mengedepankan kebijakan pembangunan yang pro petani untuk mengikis kemiskinan struktural dan melindungi petani yang termarginalisasi akibat proses pembangunan. Nelayanpun senantiasa hidup dalam lingkaran kemiskinan tak berujung. Akses terhadap permodalan yang minim, penggunaan teknologi penangkapan ikan yang masih tradisional, serta keberpihakan pemerintah yang minim pada sektor perikanan dan

kelautan, menjadi rangkaian simpul kemiskinan yang selalu mendera nelayan.

Partai GERINDRA akan secara bersungguh-sungguh meningkatkan harkat dan martabat petani dan nelayan dari kubangan kemiskinan dengan menyediakan akses permodalan yang bersahabat dengan petani-nelayan dan mendukung modernisasi teknologi pertanian dan penangkapan ikan. Partai GERINDRA juga memperjuangkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan seperti PNS honorer, guru bantu, dan para buruh pabrik yang penghasilannya masih dibawah upah minimum. Bagi PNS honorer dan guru bantu, kejelasan status dan peningkatan pendapatan merupakan agenda utama yang harus dilaksanakan.

Sementara bagi para buruh, jaminan pendapatan diatas upah minimum serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kepedulian utama partai GERINDRA. Selanjutnya kelompok fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, dan usia lanjut, merupakan kelompok masyarakat yang harus mendapat perhatian dan perlindungan negara. Partai GERINDRA memandang bahwa kelompok masyarakat dimaksud bukan merupakan beban tetapi tenaga potensial yang harus diberdayakan secara sosial dan ekonomi sehingga berdaya guna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kebijakan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang selama ini diimplementasikan oleh pemerintah cenderung bersifat temporer, kuratif, dan sumbangan (*charity*).

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) misalnya, lebih merupakan akibat dari kenaikan harga BBM yang cenderung bersifat amal dan tidak mendidik masyarakat miskin. Bagi partai GERINDRA pembagian BLT harus diformulasikan melalui penciptaan lapangan kerja padat karya dilingkungan kelompok miskin dimana yang bekerja dan mendapat upah adalah kelompok miskin penerima BLT.

Partai GERINDRA berpendirian bahwa masyarakat miskin harus dijadikan subyek yang harus membebaskan diri dari kemiskinan. Selain itu, untuk mensejahterakan rakyat, partai GERINDRA berkomitmen menjamin hak-hak tiap individu dan keluarga dalam memperoleh pendapatan minimum yang layak dan sesuai agar mampu memenuhi kebutuhan pokok. Partai GERINDRA berjuang mendorong adanya perlindungan sosial secara sistemik jika individu dan keluarga berada dalam situasi rawan sehingga rakyat pada akhirnya mampu menghadapi *social contingencies*, seperti lanjut usia, sakit, menganggur, dan kemiskinan yang berdampak mengarah pada krisis sosial.

Partai GERINDRA juga bersikap sama terhadap setiap warga negara untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi bagi balita, sanitasi, dan air bersih tanpa adanya pembedaan status dan kelas sosial. Partai GERINDRA akan mengembangkan kembali Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu instrumen pengendalian penduduk. Ledakan penduduk merupakan salah satu masalah dasar kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan penduduk yang tak terkendali akan mengganggu persediaan pangan yang dapat berakibat pada kelaparan, gizi buruk dan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

d. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Pembangunan ekonomi dititik beratkan pada pembangunan sektor pertanian, sektor yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir, ada keterkaitan antar usaha pertanian serta antar sektor menuju kerjasama saling menguntungkan. Kondisi saat ini belum adil, subsistem produksi (*on farm*) masih menjadi mata rantai terlemah.

Petani sebagai produsen masih dihadapkan pada permasalahan ketersediaan input (benih, pupuk, obat-obatan dan lain-lain) dengan harga terjangkau. Sementara itu petani juga menghadapi resiko

produksi sebagai konsekuensi atas ketergantungan kepada alam, dan resiko harga. Dengan kondisi ini, petani sulit mencapai produktivitas dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Sampai saat ini nilai tukar petani masih rendah dan petani belum banyak ikut menikmati peningkatan nilai tambah produk pertanian.

Karena itu, pembangunan pertanian dengan strategi pendekatan sistem agribisnis masih harus terus ditingkatkan. Partai GERINDRA akan berusaha mendorong lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pertanian, khususnya sektor usaha tani. Pembangunan pertanian diarahkan untuk kebijakan yang berpihak pada pertanian, pelayanan penyuluhan, penyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan pertanahan yang berkeadilan, kemudahan akses permodalan, serta upaya pemerataan nilai tambah sebagai upaya meningkatkan nilai tukar petani menuju kemakmuran petani.

Sektor perikanan dan kelautan, seperti halnya pertanian, merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ini memiliki potensi besar dan bisa menjadi modal utama pembangunan bangsa. Ironisnya potensi besar ini justru dieksploitasi oleh bangsa dan negara lain, dengan melakukan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di perairan Indonesia. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan difokuskan dengan membangun nelayan sebagai subyek utama. Partai GERINDRA menilai pembangunan kedua sektor akan berhasil dengan memberdayakan kelompok nelayan. Pemberdayaan nelayan dilakukan dengan memberikan akses permodalan yang memadai dan memahami karakteristik nelayan serta memordenisasi teknologi penangkapan ikan. Dengan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal, pemerinatah harus melindungi dan melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk *illegal fishing* yang dilakukan pihak asing. Upaya ini sejatinya menegaskan kedaulatan laut Indonesia.

Partai GERINDRA memperjuangkan perlindungan petani dan nelayan beserta komoditinya. Perlindungan dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pentingnya keberadaan petani dan nelayan. Bagi partai GERINDRA, profesi petani dan nelayan adalah profesi mulia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

e. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemanasan global (*global warming*) merupakan permasalahan penting yang menentukan keberlangsungan hidup umat manusia dimuka bumi ini. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak ramah lingkungan menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan.

Secara akumulatif, kondisi ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan berakibat terjadinya bencana yang datang silih berganti. Partai GERINDRA menilai kurangnya infrastruktur serta lemahnya kesadaran atas kelestarian alam, telah menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang kerusakan hutan tercepat di dunia. Untuk itu, pengelolaan hutan, laut dan seisinya harus dengan tata rencana yang baik dan berkelanjutan untuk menghindari unsur-unsur eksploitatif yang memicu kerusakan alam. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang baik harus menyertakan pemerintah lokal dan masyarakat adat setempat dengan tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Hal ini selain memberikan kontribusi positif secara pemuliaan alam juga berdampak ekonomis. Iklim mengisi ruang hidup kita baik secara individu maupun sosial, karena itu menegakkan keadilan iklim harus melibatkan kesadaran dan komitmen semua pihak dan mendesak terciptanya kebijakan industrialisasi yang pro-lingkungan hidup serta melakukan tindakan tegas kepada pelaku perusakan alam.

Partai GERINDRA mendukung kebijakan disiplin pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya secara sistemik sebagai antisipasi degradasi lingkungan hidup. Partai GERINDRA mendukung segala upaya pelestarian dan perlindungan hutan alam serta satwa liar yang merupakan kekayaan bangsa. Hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku akan ditegakkan secara tegas dan tuntas. Korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup akan diberantas secara menyeluruh. Penyelundupan satwa liar ke luar negeri akan dihentikan.

Pencemaran udara, laut, dan darat, akan dipantau dan dihentikan. Dalam pengelolaan sektor kehutanan, partai GERINDRA juga akan mendorong diberlakukannya sistem kehutanan rakyat. Yakni sebuah sistem yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan aturan-aturan lokal yang disepakati bersama oleh rakyat itu sendiri. Sistem Hutan Kerakyatan tidak mengarah hanya pada kayu, namun pada pengembangan pengelolaan hasil hutan non kayu sebagai produk utama. Kalaupun menebang hutan, hal tersebut hanya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan komunitas. Peran pemerintah dalam sistem hutan kerakyatan akan lebih pada dukungan (fasilitas), kemitraan, pembuat kebijakan umum (prinsip-prinsip) dan pengakuan kawasan kelola rakyat.

Partai GERINDRA akan melaksanakan program pohon aren sebagai upaya ramah lingkungan sekaligus menuju swasembada energi. Pohon aren dapat dikembangkan sebagai sumber ethanol. Pohon aren juga tahan erosi dan dapat menjadi sumber reboisasi lahan-lahan gundul. Pengembangan program pohon aren juga akan memperluas lapangan kerja.

f. Bidang Sosial, Budaya, dan Pendidikan

Memelihara dan memajukan peradaban merupakan program jangka panjang di bidang sosial budaya. Kebijakan sosial budaya seharusnya mampu menempatkan peradaban sebagai motivasi penting dalam memajukan bangsa dan negara. Berkat keluhuran sistem nilai sistem budaya, bangsa Indonesia mampu bertahan dari berbagai krisis.



Negara wajib melindungi kekayaan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melestarikannya demi kesejahteraan umum.

Kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia adalah hasil perjalanan bangsa Indonesia yang telah membentuk identitas dan jati diri bangsa. Kekuatan budaya mempunyai peran penting mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Tanpa kebudayaan yang kuat dan berakar, kita akan gampang menghadapi globalisasi dan masa depan yang kompetitif. Pembangunan dibidang kebudayaan merupakan landasan bagi proses pembangunan karakter dan bangsa (*character and national building*).

Partai GERINDRA menilai, dalam menghadapi globalisasi budaya yang ditandai arus masuknya budaya bangsa lain, maka kita harus memperkuat budaya bangsa. Warisan budaya (cultural heritage) bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dikembangkan dan diperbaharui agar dapat menjadi penuntun menuju masa depan. Dibidang pendidikan, partai GERINDRA mendukung peningkatan anggaran pendidikan nasional hingga 20%. Peningkatan anggaran merupakan konsekuensi logis dalam menciptakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus sebagai sebuah bentuk realisasi dari tanggung jawab konstitusi. Peningkatan anggaran harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan tingkat menengah (menengah tingkat pertama dan menengah atas) harus lebih dijuruskan pada pendidikan kejuruan terutama teknik dan ekonomi, yang bisa langsung terserap dunia kerja.

Partai GERINDRA mengusung konsep pendidikan siap pakai ditingkat sekolah lanjutan, yang dapat menciptakan lulusan siap kerja. Partai GERINDRA akan memperjuangkan wajib belajar 12 Tahun sebagai kelanjutan wajib belajar 9 Tahun. Persaingan global yang terjadi menuntut tumbuhnya sumber daya manusia handal, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Sehingga wajib belajar 12 Tahun

hingga jenjang pendidikan tingkat atas, akan menjadi prioritas partai GERINDRA dalam meningkatkan kecerdasan bangsa.

Selain mengusung wajib belajar 12 Tahun, partai GERINDRA akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga didik untuk memajukan kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia. Rendahnya insentif menjadi tenaga didik telah menyebabkan minat generasi muda untuk meneruskan mencerdaskan bangsa sebagai tenaga didik, semakin menurun. Selanjutnya, kualitas tenaga didik Indonesia semakin lama semakin menurun pula. Partai GERINDRA juga mengusung pembangunan perpustakaan daerah dengan standar internasional di setiap kabupaten, sebagai upaya sistemik membangun minat serta karakter akademis masyarakat Indonesia. Salah satu infrastruktur terpenting dalam mengembangkan khazanah akademik adalah perpustakaan yang menyediakan berbagai macam sumber ilmu.

Perpustakaan menjadi pusat aktivitas masyarakat, tidak hanya untuk membaca atau berdiskusi, namun disana juga masyarakat dapat mengembangkan wawasan serta bersosialisasi secara produktif dalam membangun daerah. Partai GERINDRA memberikan perhatian penuh pada optimalisasi fungsi perpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Secara sistemik, partai GERINDRA akan memperjuangkan pembangunan sistem pendidikan yang humanis, bukan sistem pendidikan yang liberal-kapitalistik. Partai GERINDRA menolak liberalisasi di bidang pendidikan yang dapat menjadikan pendidikan sebagai awal dari startifikasi sosial. Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat.

Pendidikan bukanlah komoditas perdagangan yang diperjualbelikan, namun merupakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan rakyatnya. Dengan demikian, Partai GERINDRA akan meletakkan kembali posisi pengelolaan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam haluan UUD 1945.

g. Bidang Hukum

Indonesia adalah negara hukum, demikian naskah penjelasan UUD 1945. teks ini tetap bersemi dihati rakyat Indonesia sebagai kesepakatan luhur. Hukum menyangkut kesadaran hukum masyarakat, perangkat peraturan perundangan, dan aparat penegak hukum. Partai GERINDRA memperjuangkan reformasi dibidang hukum. Reformasi hukum harus menyentuh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kelemahan dibidang hukum terkait perangkat peraturan perundang-undangan. Perlu penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada. Lemahnya perangkat peraturan perundangan seringkali akibat substansi yang komprehensif dan tidak konsisten. Hal ini terjadi karena tak ada keserasian antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perundang-undangan, dan menonjolnya kepentingan kelompok ketimbang kepentingan nasional. Kenyataan ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu perlu usaha keras melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-perundangan yang ada dan mensesiasikannya.

Kelemahan aparat penegak hukum tergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatnya. Disamping kurangnya komitmen moral, juga terlalu banyak lembaga yang difungsikan sebagai aparat penegak hukum. Terjadi tumpang tindih dan tabrakan antar aparat penegak hukum. Karena itu, diperlukan penyederhanaan dan penyegaran aparat penegak hukum sehingga terjadi keadilan dan persamaan hak didepan hukum. Diperlukan aparat penegak hukum yang bersih, profesional dan bermartabat. Partai GERINDRA akan memperjuangkan terciptanya tertib hukum nasional yang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan penegakan hukum dilakukan dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengikutsertakan rakyat dalam penegakan hukum.

Untuk itu perlu pendidikan publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Partai GERINDRA memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta melakukan tindakan hukum yang tegas kepada pelaku yang terlibat KKN. Pemberantasan korupsi yang harus dilakukan dari atas tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, dan semata-mata berdasarkan penegakan hukum. Pemberantasan korupsi yang tebang pilih dapat menyebabkan tindakan itu menjadi alat kekuasaan. Pada dasarnya pemberantasan korupsi yang terpenting adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diiringi perbaikan sistem birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum secara tegas. Terkait kepentingan nasional dibidang ekonomi, partai GERINDRA mendesak dilakukannya penyesuaian terhadap Undang-Undang yang tidak sehaluan dengan UUD 1945 seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Migas, dan Undang-Undang lainnya yang bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan.

#### h. Bidang Hak Asasi Manusia

Negara menegakkan kemanusiaan yang beradab. Warganegara terhadap hukum, tidak diperlakukan sebagai subyek yang secara potensial pelaku perbuatan pelanggaran hukum. Negara menghargai kesetiaan rakyat terhadap negara dan amal bakti warga terhadap terhadap masyarakat dan negara. Warga negara harus menghormati perjanjian luhurnya kepada negara sebagai organisasi. Siapa saja yang berikrar menjadi bagian dari organisasi negara dengan sendirinya harus menghormati hak negara. Negara menghormati hak-hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya Pengadilan HAM merupakan sesuatu yang *overbodig* (berlebihan).

Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia harus ditempatkan dalam perspektif hukum. Hukum disusun antara lain untuk mengatur bagaimana warga negara menjalankan hak-haknya sebagai pribadi.

Hak-hak warga negara secara pribadi tak dapat dijalankan diluar hukum. Negara sebagai organisasi berjalan sesuai hukum. Warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar oleh negara dapat menggugat negara dan pejabatnya secara hukum. Hak-hak asasi manusia adalah materi sistem hukum. Jika hak-hak asasi manusia belum secara lengkap tercermin dalam hukum positif, maka sistem hukumnya yang harus disempurnakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerancuan sistem. Karena itu, diperlukan klarifikasi kedudukan hak-hak asasi manusia disatu pihak, dan sistem hukum pada pihak lain. Hak-hak asasi manusia yang bersifat universal seharusnya mempertimbangkan partikularisme budaya dan kepentingan nasional.

Partai GERINDRA menolak dijadikannya isu hak-hak asasi manusia sebagai instrumen politik pihak asing untuk mendikte dan campur tangan dalam urusan domestik negara Indonesia. Standar ganda dalam penerapan hak-hak asasi manusia adalah indikator isu hak-hak asasi manusia hanya dijadikan alat politik kekuasaan. Secara umum, ruang lingkup negara dalam pemenuhan hak asasi manusia terangkai dalam tiga titik penting, yaitu tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, dan pemenuhan hak perdamaian dan pembangunan. Pemenuhan hak sipil dan politik terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemberian ruang yang adil bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, tidak ada diskriminasi ras dan gender, bahkan secara sistemik perlu *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ruang politik.

Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak kesehatan, hak membentuk serikat pekerja, dan hak atas jaminan sosial. Pemenuhan hak perdamaian dan pembangunan, adalah tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan adanya pembangunan berkelanjutan

disetiap daerah di Indonesia, yang disertai dengan penciptaan suasana aman, damai, dan kondusif di setiap wilayah. Atas ketiga hal ini, Partai GERINDRA berkomitmen untuk berjuang dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dimandatkan dalam UUD 1945 demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

i. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pembinaan Hankam harus diartikan sebagai pembinaan pertahanan dan keamanan tanpa memisahkan pengertian pertahanan disatu pihak dan keamanan di pihak lain. Kedua unsur itu tak dapat dipisahkan, tindak pertahanan menimbulkan keamanan. Perasaan aman menguatkan dasar-dasar pertahanan. Karena itu organisasi Hankam harus mencerminkan keutuhan pengertian pertahanan-keamanan, dan bukan sebaliknya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang telah terbukti keampuhannya harus lebih dioperasionalkan yang didukung dengan peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan modernisasi infrastruktur Alutsista (alat utama sistem senjata) TNI serta profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Di samping itu, manajemen pertahanan yang handal yakni dalam kultur, struktur kewan, hubungannya dengan negara, anggaran, doktrin, postur dan operasi, hubungan sipil-militer, baik itu dalam manajemen kepolisian maupun TNI harus mendapat perhatian khusus untuk mencapai pertahanan negara yang kuat dan kondusif. Partai GERINDRA akan memperjuangkan pengembangan industri pertahanan nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri. Industri pertahanan nasional yang kuat akan mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan terkait ancaman militer dan non militer dari luar negeri, separatisme, dan perubahan geopolitik yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembinaan keamanan dan penegakan hukum, selain adanya upaya aktif dari pemerintah, pembangunan sektor ini juga mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat. Tidak hanya sebagai obyek, masyarakat menjadi subyek yang berperan melakukan fungsi kontrol. Implikasi upaya melibatkan masyarakat ke sektor keamanan mensyaratkan kerangka aturan legal sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap sektor keamanan, mekanisme pengawasan yang efektif, misalnya melalui DPR untuk mengawasi anggaran, operasi militer dan hak asasi manusia (HAM). Partai GERINDRA memiliki komitmen dalam membenahan aspek regulasi sektor pertahanan.

Perlu ada pembagian tugas yang jelas antara TNI dan Polri melalui penyelarasan aturan-aturan yang ada. Meskipun sejak 2003 sudah ada *white defensepaper*, UU Pemisahan TNI dan Polri (Tap MPR No VII/2000), namun masih terjadi kerancuan dalam UU No. 3/2002, yakni bahwa dalam tugas militer masih disebutkan: menjaga rakyat dari berbagai kemungkinan ancaman. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kerancuan tanggung jawab antara TNI dan Polri, yang dapat memperlemah soliditas struktural di internal sektor keamanan. Pembenahan regulasi diperlukan untuk menciptakan kondisi pertahanan yang kuat dan kondusif.

j. Bidang Otonomi Daerah

Otonomi daerah, yang merupakan bentuk pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adalah delegasi kekuasaan secara vertikal dengan mengindahkan genus kekuasaan yang bersifat tunggal dan utuh. Otonomi daerah adalah kewenangan administratif yang diberikan kepada daerah, dalam batas-batas tertentu demi kelancaran pembangunan, dan secara teknis menyederhanakan jalur birokrasi vertikal. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menyimpang dari asas didirikannya NKRI, partai GERINDRA akan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah otonomi daerah.

Lemahnya infrastruktur daerah telah menyebabkan inefisiensi dalam implementasi otonomi daerah. Pembangunan daerah tidak berjalan sesuai harapan. Pemimpin daerah menjadi "raja-raja" kecil. Lebih jauh dampak negatif yang terjadi adalah terdesentralisasinya korupsi. Korupsi yang sebelumnya terpusat, dengan pemberlakuan otonomi daerah, menyebar ke daerah kabupaten/kota melalui korupsi APBD. Hal ini terjadi karena lemahnya profesionalisme aparat pemerintah daerah, lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum, dan kegagalan konsep desentralisasi yang tak terkendali. Partai GERINDRA menilai otonomi daerah lebih efektif dan terkendali jika sampai tingkat provinsi.

Terkait masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, rakyat semakin jenuh terhadap politik. Kejenuhan ini dapat dilihat dengan semakin besarnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam Pilkada. Kejenuhan ini berpotensi negatif pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang bermuara pada rendahnya legitimasi pemerintah. Selain itu Pilkada telah menyebabkan konflik horisontal dalam masyarakat yang kontraproduktif. Partai GERINDRA akan melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan Pilkada dan mengupayakan penyelenggaraan Pilkada secara serentak. Partai GERINDRA akan melakukan peninjauan ulang terhadap semua Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan, suku, agama dan ras. Partai GERINDRA menjunjung tinggi prinsip persamaan hak antara suku, agama dan ras. Partai GERINDRA akan melawan semua Perda yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai GERINDRA menilai kehadiran kebijakan otonomi daerah merupakan langkah maju dalam tata pemerintahan Indonesia. Namun otonomi daerah yang berjalan tanpa kontrol pemerintah pusat dapat menyebabkan ketimpangan horisontal antar daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam berpotensi maju,



sementara daerah yang minim potensi sumber daya alam akan semakin terbelakang.

Dengan bentuk negara kesatuan, semangat desentralisasi harus menemukan modifikasi yang tepat, sehingga kesenjangan daerah yang miskin dan kaya bisa teratasi dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Partai GERINDRA memperjuangkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tetap berada dalam koridor negara kesatuan, dengan orientasi luhur untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### k. Bidang Agama

Strategi kebijakan yang belum pernah mampu dirumuskan Indonesia dalam masalah agama adalah bagaimana menempatkan kehidupan beragama di Indonesia dalam format kemasyarakatan dan kenegaraan Pancasila. Sehingga keluhuran agama dapat dipelihara, dan kemajuan bangsa dapat sejalan berkembang. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan didalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama. Kerukunan antar umat beragam merupakan modal dasar tetap eksisnya bangsa Indonesia. Pembinaan kerukunan dengan dasar saling menghormati ajaran agama masing-masing menjadi prasyarat terbinanya kerukunan antar umat beragama yang kondusif. Menyadari pentingnya agama dan kerukunan antar umat beragama, partai GERINDRA bersikap senantiasa menjamin kebebasan beragama, menjaga kemurnian ajaran agama, dan membina kerukunan antar umat beragama.

## 1. Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional

Politik luar negeri dan hubungan internasional harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Hubungan bilateral, multilateral dan kedudukan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional harus didasarkan pada kepentingan nasional. Indonesia harus menjadi bangsa terhormat dan bermartabat dalam pergaulan internasional dan senantiasa pro-aktif dalam perdamaian dunia. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif harus ditempatkan dalam konteks aktual zaman.

Perubahan-perubahan geopolitik ditingkat regional dan dunia menuntut strategi diplomasi yang handal. Indonesia harus menjadi subyek yang menentukan sikap sendiri, bukan obyek dari pertarungan politik internasional. Partai GERINDRA akan memperjuangkan politik luar negeri yang progresif, yang dapat menempatkan Indonesia kembali sebagai negara yang berperan dan dihormati di Asia dan dunia. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara Asia seperti Republik Rakyat Cina, Jepang, India, Korea Selatan di bidang ekonomi. Berakhirnya perang dingin tidak dengan sendirinya menampilkan Amerika Serikat sebagai kekuatan adikuasa tunggal. Dunia menjadi multipolar. Ada berbagai kekuatan yang berpengaruh dalam pentas politik masyarakat internasional. Uni Eropa menjanjikan kemajuan ekonomi.

Republik Rakyat Cina (RRC) semakin menunjukkan kekuatan ekonomi, militer dan nuklir. Republik Federasi Rusia, sejak dibawah pemerintah Vladimir Putin berhasil membawa kembali kehormatan Rusia di bidang ekonomi dan militer. India berkembang pesat ekonominya dan di bidang militer memiliki kekuatan nuklir. Negara-negara sosialis Amerika Latin seperti Venezuela, Argentina, Brasil dan Bolivia mempunyai potensi ekonomi yang kuat dan berani menentukan jalan sendiri yang seringkali bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia sangat kaya dan tangguh kekuatan militernya.

Iran memiliki potensi ekonomi karena minyak dan mengembangkan teknologi nuklir.

Tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru ini memaksa masyarakat internasional kembali ke meja perundingan sebagai jalan terbaik mencari penyelesaian konflik. Invasi AS atas negara berdaulat Irak terbukti gagal dan telah menyebabkan AS semakin terkucil dan terpuruk dalam pergaulan dunia. Indonesia harus dapat memainkan peran dalam era baru internasional. Nilai strategis karena letak kedudukan geografis, kekayaan alam, dan potensi sumber daya manusia harus bisa menjadi modal diplomasi yang menguntungkan kepentingan nasional. Partai GERINDRA menilai perlunya reaktualisasi politik luar negeri Indonesia yang ketinggalan zaman.

Paradigma regionalisme yang mengantarkan lahirnya ASEAN sudah menjadi artefak sejarah diplomasi. Sama halnya dengan Gerakan Non Blok (GNB). Politik luar negeri Indonesia tidak boleh diabdikan untuk melayani adidaya dan sekutu-sekutunya. Kita juga tak dapat terus-menerus bergantung pada "solidaritas" ASEAN yang terbukti nihil ketika bertabrakan dengan kepentingan nasional masing-masing. Kasus lepasnya Sipadan Ligitan, konflik Ambalat, negosiasi ekstradisi dengan Singapura adalah beberapa contoh kegagalan diplomasi Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia harus diabdikan pada kepentingan nasional dengan berlandaskan kekuatan sendiri dengan penentuan sikap sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan sesungguhnya. Reaktualisasi politik luar negeri tak hanya menyangkut kebijakan tapi juga sumber daya manusia di bidang diplomasi. Para diplomat sebagai bagian pelaksana politik luar negeri harus memiliki sifat kejuangan, keberanian, bervisi jauh ke depan dan menjaga kehormatan bangsa. Pelaksana politik luar negeri bukan jabatan yang hanya merupakan jenjang karier politik luar negeri bukan jabatan yang hanya merupakan jenjang karier birokratik, tetapi profesionalisme.

#### m. Bidang Hak-Hak Perempuan

Kaum perempuan adalah mayoritas di Indonesia. Perjuangan untuk kemajuan perempuan diarahkan untuk mendapat pengakuan yang sama dengan kaum laki-laki diberbagai bidang kehidupan. Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Perempuan bukan warnegara kelas dua yang dipinggirkan dan didiskriminasikan.

Partai GERINDRA memperjuangkan pemberdayaan perempuan untuk ikut memajukan bangsa dan terbebas dari diskriminasi, ketidakadilan serta marjinalisasi. Faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah pembuatan kebijakan publik yang sensitif gender. Kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan. Kurangnya peran perempuan disektor politik menyebabkan perempuan menjadi obyek dan korban. Kaum perempuan juga harus mendapat akses yang sama di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu bentuk diskriminasi adalah kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan diwilayah publik maupun privat. Partai GERINDRA akan memperjuangkan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Partai GERINDRA juga akan memperjuangkan hak-hak tenaga kerja perempuan diluar negeri untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil. Partai GERINDRA akan melawan tegas semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Pada tataran politik, kebijakan anggaran negara baik APBN maupun APBD belum berpihak pada perempuan. Hal ini terlihat nyata dari kuatnya kecenderungan sektor-sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan penempatan buruh migran yang tidak berpihak pada perempuan. Kesehatan masyarakat masih buruk terutama kesehatan perempuan dan anak, angka putus sekolah dan buta huruf pada perempuan tetap tinggi, dan angka kematian anak dan

ibu melahirkan tetap tinggi. Partai GERINDRA mendukung kebijakan anggaran pro perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia.

n. Bidang Pemuda

Pemuda merupakan elemen strategis dalam perjuangan mencapai maupun mengisi kemerdekaan. Eksistensi dan peran strategis pemuda dalam setiap babak sejarah perjalanan dan perkembangan bangsa Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Jejak langkah pemuda senantiasa tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai GERINDRA sangat menyadari dan menghargai eksistensi serta peran pemuda Indonesia. Pemuda merupakan tulang punggung bangsa. Partai GERINDRA memposisikan sebagai rumah perjuangan pemuda Indonesia dan siap bergandengan tangan untuk menulis sejarah masa depan perjalanan bangsa. Salah satu isu terkait dengan kepemudaan dan perubahan bangsa adalah kepemimpinan.

Pemuda harus mempersiapkan diri dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional sehingga tercipta proses sirkulasi elit yang sehat, dinamis, dan konstitusional. Proses regenerasi kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari dan harus dipersiapkan secara dini dan matang. Dalam konteks ini, partai GERINDRA mendorong proses regenerasi kepemimpinan bangsa dan menjadi mitra pemuda dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas, integritas dan kenegarawanan. Bersama partai GERINDRA, pemuda Indonesia siap menerima regenerasi kepemimpinan bangsa.

Pemuda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial, juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kemampuannya sehingga memiliki daya saing tinggi. Pemuda harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan global dengan pemuda-pemuda dari bangsa lain. Pemuda harus memiliki wawasan global dan membuka diri dengan berbagai dinamika global (*outward looking*). Menyadari pentingnya kualitas SDM pemuda, Partai GERINDRA akan memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya saing

pemuda Indonesia sebagai aset penting bangsa dan karenanya partai Gerindra memposisikan diri sebagai mitra pemuda Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda Indonesia.

o. Bidang Perburuhan

Persoalan perburuhan selalu memprihatinkan baik terkait hubungan dengan majikan, upah, efektivitas industri dan peluang kerja, keseimbangan produksi dan konsumsi, ataupun jaminan asuransinya. Ketidakpuasan buruh terhadap manajemen kerja dan industri seringkali diungkapkan dalam bentuk pemogokan, demonstrasi, bahkan sabotase. Kondisi ini tidak kondusif bagi iklim dunia usaha dan industri serta menyebabkan hilangnya potensi investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Partai GERINDRA menilai hubungan buruh dan pengusaha perlu ditempatkan sebagai relasi yang seimbang, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Fungsi dan status buruh dalam dunia kerja harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk keberhasilan dunia usaha. Buruh bukanlah pihak yang selalu membutuhkan dan harus menerima putusan majikan apa adanya. Sementara pengusaha juga tidak diposisikan selalu mengulurkan tangan membuka kesempatan kepada kelompok buruh. Hubungan yang saling menguntungkan didasarkan pada profesionalisme dan penghargaan terhadap kinerja. Maka permasalahan seperti upah, jaminan asuransi, dan pemenuhan hak-hak dasar buruh lainnya dapat diselesaikan melalui mekanisme terbuka sesuai aturan yang adil.

Partai GERINDRA mengusung pemberdayaan kelompok buruh secara sistemik, untuk memberikan akomodasi politik sebagai saluran aspirasi. Partai GERINDRA juga mendukung partisipasi buruh dalam manajemen. Pandangan yang selama ini menjadikan buruh hanya sebagai obyek manajemen industri, perlu diperluas agar buruh juga mendapatkan kesempatan sebagai subyek dalam manajemen industri. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergi antara kelompok buruh dan

pengusaha yang produktif dan berkeadilan, serta menghindarkan adanya eksploitasi dari satu pihak terhadap pihak yang lain.

p. Bidang Riset dan Teknologi

Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ketergantungan pada bangsa lain atas produk-produk berbasis teknologi baik teknologi tinggi maupun teknologi rendah, sangat membahayakan. Penguasaan dan kemandirian teknologi harus segera dikembangkan dengan cara memilih teknologi yang menyentuh secara langsung aspek kehidupan bangsa khususnya di bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan.

Penelitian yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga negara harus diarahkan pada prinsip-prinsip memajukan bangsa, dimulai dengan memilih teknologi tepat guna untuk membantu mengembangkan industri-industri lokal yang dikelola oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memproduksi berbagai barang-barang keperluan masyarakat sehari-hari. Bidang-bidang yang perlu mendapat perhatian sangat khusus adalah bidang teknologi pertanian, teknologi pangan, teknologi industri, teknologi informasi, transportasi, dan pengembangan energi alternatif seperti biofuel, ethanol dari aren dan *coal-to-liquid*.

6. Bentuk Pendidikan Politik Partai GERINDRA

Bentuk pendidikan politik partai GERINDRA yang diberikan kepada para generasi muda dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara ada yang secara langsung ataupun tidak langsung, media yang digunakan secara langsung misalnya diskusi terbuka, pelatihan, pengajian ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara langsung bertatap muka. Sedangkan pendidikan politik yang dilaksanakan secara tidak langsung bisa melalui spanduk, *leaflet*, ataupun selebaran. Dan bentuk pendidikan politik di partai GERINDRA adalah para kader-kader yang dikirim oleh pengurus partai GERINDRA dari berbagai daerah di Indonesia. Di pusat latihan Hambalang Bogor tersebut dimana kader-kader mendapat pendidikan baris-berbaris, latihan berkuda, dan marching band. Dari latihan baris berbaris, berkuda hingga marching band ini

benar-benar diterapkan disiplin tinggi. Bagi yang terlambat atau melakukan kesalahan bisa dikenai sanksi. Selain pelatihan fisik, kepada kader juga ditanamkan ideologi kebangsaan. Sehingga para kader dapat memunculkan calon-calon pemimpin berkualitas yang memahami tentang politik.

## 7. Enam Program Aksi Partai GERINDRA

### 1. Membangun Ekonomi yang Kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur

- a) Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta (3.500 dollar AS) menjadi Rp 60 juta (6000 dollar AS) dengan pertumbuhan diatas 10 persen.
- b) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0.41 menjadi mencapai 0.31) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85.
- c) Meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga mencapai ratio minimal 16 persen dari Produk Domestik Bruto dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil, menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran, dan mengelola utang pemerintah dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif.
- d) Mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah, industrialisasi, dan industri pengelolaan.
- e) Menjadi BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
- f) Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional.
- g) Membangun dan mengembangkan industri nasional :
  - Transfortasi darat (kereta api, mobil, dan sepeda motor)
  - Transfortasi laut (angkutan kapal laut dan angkutan sungai)



- Transportasi udara (pesawat terbang)
  - Alat berat dan alat mesin pertanian.
2. Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan
- a) Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
  - b) Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
  - c) Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
  - d) Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional.
  - e) Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).
  - f) Membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu :
    - (1) Jalan, Jembatan dan Irigasi Desa dan Pesisir
    - (2) Listrik dan Air Bersih Desa
    - (3) Koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Lembaga Keuangan Mikro
    - (4) Lumbung Desa
    - (5) Pasar Desa
    - (6) Klinik dan Rumah Sehat Desa
    - (7) Pendidikan dan Wirausaha Muda Desa
    - (8) Sistem Informasi Desa dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa.
  - g) Mendirikan Lembaga Tabung Haji

- h) Mempercepat reforma agraria untuk meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.
3. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi serta Pengamanan Sumber Daya Air
- a) Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedele dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
  - b) Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal susu, telur, ikan dan daging.
  - c) Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang-sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
  - d) Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.
  - e) Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW.
  - f) Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol dan pabrik DME (pengganti elpiji)
  - g) Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air.
  - h) Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan sekaligus terjangkau konsumen.
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Indonesia melalui Program Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya serta Olahraga
- a) Memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan pancasila, kebangsaan dan budi pekerti.
  - b) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku

pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.

- c) Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memajukan karya dan bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal.
- d) Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.
- e) Mengembangkan sekolah-sekolah agama dan pesantren mulai dari madrasah ibtida'iyah, tsanawiyah, dan aliyah.
- f) Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh.
- g) Memberantas perdagangan manusia dan membasmi peredaran serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi para pelakunya.
- h) Menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis.
- i) Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.
- j) Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.
- k) Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas, dan mengembangkan program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- l) Menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah.

- m) Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdikan diri di daerah miskin dan tertinggal.
  - n) Melestarikan warisan budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa.
  - o) Meningkatkan prestasi Tim Nasional sepak bola Indonesia.
5. Membangun Infrastruktur dan Menjaga Kelestarian Alam serta Lingkungan Hidup
- a) Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia; jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 3.000 rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik dan telekomunikasi.
  - b) Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir
  - c) Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata
  - d) Merehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang-sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam
  - e) Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan, dan melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa
  - f) Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.
6. Membangun Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kuat, Tegas dan Efektif
- a) Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara melalui reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif
  - b) Menciptakan kepastian dan penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu
  - c) Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel
  - d) Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya termasuk para veteran dan pensiunan

- e) Menepatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **D. Kaum Muda/kalangan pemuda**

##### 1. Pengertian Pemuda

Secara umum definisi daripada pemuda itu setidaknya memiliki dua definisi yang menyangkut batasan usia pemuda, sifat ataupun karakteristik pemuda, dan tujuan dari aktivitas kepemudaan. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda ditinjau dari ideologi politik, dalam hal ini berumur antara 17-30 tahun (Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda) ditetapkan sebagai diakuinya hak-hak politik pemuda dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Hal tersebut terlihat dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum pada usia 17 tahun.

Masa muda adalah masa kehidupan yang optimal. Pada masa tersebut kematangan jasmani, perasaan, dan akalnya serta mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Pikiran kritis dan tindakannya yang strategis sangat didambakan oleh masyarakat sekelilingnya. Pemuda merupakan agen perubahan sosial (*agent social of change*) yang memiliki beban berat untuk menggapai perubahan serta berbuat secara kongkrit dalam rangka penyelamatan generasi (Setiawan, 2009, hlm. 63-71).

Pemuda merupakan agen sekaligus pemimpin perubahan, pemuda tidak dapat meletakkan cita-cita bangsa dan masa depan mereka pada segelintir elit bangsa yang hanya mengambil keuntungan sesaat dari kekuasaan. Pemuda yang relatif bersih dari berbagai kasus dan kepentingan harus dihitung sebagai aset yang mahal untuk kejayaan Indonesia di masa depan (Setiawan, 2009, hlm. 73). Peran serta pemuda dalam kegiatan politik sangat diperlukan

untuk memberikan warna yang baru dan perubahan yang mengarah pada perkembangan menuju masa depan bangsa Indonesia dan tidak hanya dimanfaatkan oleh elit politik yang mengambil keuntungan dan kekuasaan sesaat saja.

Kedudukan pemuda sangat penting dalam tingkat birokrasi karena dengan adanya pemuda yang ikut serta berpolitik dapat memberikan perubahan-perubahan yang signifikan dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan kritis. “Partisipasi dan kemandirian pemuda dalam bernegara adalah ekspresi kewarganegaraan yang mengindikasikan suatu negara sedang mempraktikkan demokrasi, baik secara ekonomi, politik dan sosial. Proses kemandirian dan partisipasi pemuda merupakan gerakan strategis yang perlu didorong secara terus menerus untuk menggawangi terbentuknya masyarakat madani atau *civil society*. Hal itu diperlukan karena suasana berdemokrasi di Indonesia, dalam hal ini bangunan hubungan antara negara dengan masyarakat belum melibatkan pemuda secara jelas” (Setiawan, 2009, hlm. 101).

Proses menjadi negara Indonesia yang demokrasi sangat dibutuhkan kerjasama antar pemuda dengan generasi sebelumnya, oleh karena itu pendidikan politik sangat diperlukan untuk kaum muda yang mendapatkan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap bidang politik sehingga mereka akan semakin tersadar akan hak dan kewajibannya demi terselenggaranya pembangunan nasional secara tanggung jawab dan ikut serta berpartisipasi aktif sesuai dengan amanah dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembinaan generasi muda adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka membentuk generasi yang cakap dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Para pemuda yang mendapat pembinaan dan pendidikan politik akan memberikan semangat nasionalisme yang tinggi dari para pemuda sehingga mereka dapat berorientasi politik secara jernih.

Dari paparan penjelasan diatas, penulis beranggapan bahwa pemuda ialah masa ketika seorang manusia yang beranjak dari umur 17 hingga 30 tahun yang sedang mengalami perkembangan psikis terlebih lanjut dalam hal ini

ialah emosional. Masa ini ditandai dengan diakuinya hak-hak politik bagi setiap individunya yang diharapkan dapat memberikan perubahan positif bagi masyarakat dari hasil sumbangsih pemikiran dan tindakannya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan kepemudaan berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita.

## 2. Masalah yang dihadapi kaum muda

Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain :

- a. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
- b. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
- c. Belum seimbangannya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tingginya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.
- d. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
- e. Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan, dan pertumbuhan.
- f. Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.
- g. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.
- h. Merebaknya penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif) dikalangan remaja.

- i. Belum adanya peraturan perundangan yang menyangkut generasi muda.
- 3. Upaya Partai Politik Dalam Menggalang Pemuda
  - a. Mengevaluasi pelaku politik masa kini
  - b. Memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menonjolkan diri dibidang politik
  - c. Menerima masukan dan melaksanakan kritik-kritik yang membangun dari para intelektual muda
  - d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang mencontohkan kepada partai politik akan hal-hal yang dapat menyalurkan keinginan atau aspirasi para generasi muda dengan cara-cara yang dapat menarik hati para pemuda, contohnya dengan sosialisasi politik yang santun serta melibatkan para pemuda untuk mewujudkan kehidupan iklim politik yang sejuk dan tidak hanya mementingkan kekuasaan akan tetapi juga melaksanakan proses pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Sesuai Dengan Penelitian**

1. Nama Penelitian/tahun : M. Ahda Ali Tahun/2010  
 Judul Penelitian : Peranan PKB dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat Kecamatan Wonopringgo  
 Tempat Penelitian : PAC PKB Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan  
 Pendekatan & Analisis : Kualitatif-Studi Kasus  
 Hasil Penelitian :
- a. Peranan DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat secara umum melalui pertemuan-pertemuan rutin, ataupun kontemporer seperti acara PKB setiap Jumat pahing, pengajian, dialog, kunjungan, sosialisasi, pemasangan spanduk, pamflet, diskusi serta aksi kampanye tertib dan damai. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan



Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan berciri dan bersifat keagamaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kecamatan wonopringgo, yang banyak disampaikan oleh para kyai dalam pengajian, hal ini semakin menguatkan konsolidasi kaderisasi PKB.

- b. Hambatan yang dihadapi DPAC PKB Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pendidikan politik untuk masyarakat adalah masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik maupun yang dilakukan oleh pemerintah, masih adanya sikap pragmatis dari masyarakat, pasif pada pertemuan-pertemuan, hal ini disebabkan adanya isu money politik. sedangkan hambatan dari internal DPAC PKB antara lain belum adanya manajemen efektif dari DPAC PKB terkait dengan perkembangan kader yang banyak, tidak berimbang dengan para instruktornya (pembinanya), serta adanya pemilu legislatif, dimana sebagian pengurus sibuk berkampanye untuk dirinya sendiri dan pendanaan partai yang kurang.

2. Nama Penelitian/tahun : Siwi Ningrum/2009  
 Judul Penelitian : Peran DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan Pendidikan Politik  
 Tempat Penelitian : DPD PKS Kabupaten Bekasi  
 Pendekatan & Analisis : Kualitatif-Studi Kasus  
 Hasil Penelitian :

- a. DPD PKS Kabupaten Bekasi telah melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda melalui sosialisasi, dialog, visitasi (kunjungan), spanduk, pamflet, diskusi, seminar, media massa, kontak politik langsung dan pengajian. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai keadilan sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan, namun pendekatan yang lebih ditekankan adalah pendekatan personal, hal ini untuk menguatkan konsolidasi kaderisasi PKS. Keadaan seperti ini membuat kesan bahwa PKS adalah partai tertutup dan eksklusif.

- b. Hambatan yang dihadapi oleh PKS dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Bekasi adalah masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik maupun pemerintah. Masih adanya sikap pragmatis dan paternalistik dari masyarakat yang pasif pada setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, jarak antara tempat tinggal kader dan simpatisan, dengan DPD PKS yang berjauhan, waktu untuk kegiatan yang sulit karena kesibukan masing-masing.

## **F. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

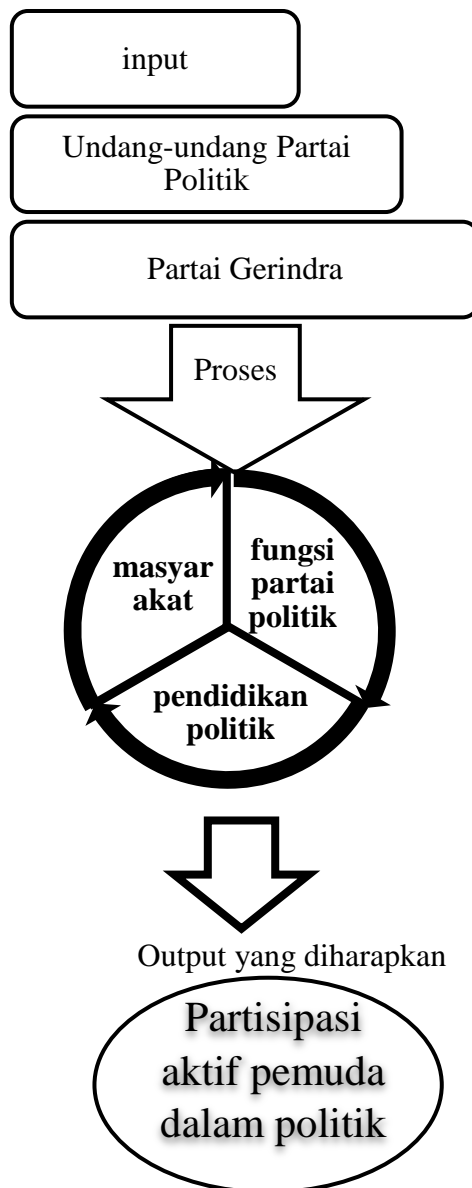
### **1. Persamaan**

Dari kedua penelitian terdahulu terdapat persamaan-persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Diantaranya adanya persamaan pada variabel bebasnya, yaitu dari kedua penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang pendidikan politik, yakni penelitian pertama meneliti bagaimana Peranan PKB dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, peneliti kedua pun memiliki inti yang sama yaitu Peran DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan Pendidikan Politik Serta penulis meneliti tentang Peran Pendidikan Politik Partai GERINDRA di Kalangan Pemuda Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

### **2. Perbedaan**

Penelitian penulis dengan kedua penelitian terdahulu juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu lokasi, waktu, dan tempat. Penelitian penulis melakukan penelitian di PAC Partai GERINDRA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, sedangkan penelitian pertama dilakukan di PAC PKB Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan penelitian kedua dilakukan DPD PKS Kabupaten Bekasi.

### G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

## **H. Pertanyaan Penelitian**

1. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah peran pendidikan politik Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dikalangan pemuda Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Apa Peran PAC Partai GERINDRA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat ?
2. Bagaimana Pendidikan politik yang dilaksanakan PAC Partai GERINDRA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang kepada kaum muda, karena kaum muda sebagai generasi penerus bangsa ?
3. Apa Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC Partai GERINDRA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ?
4. Bagaimana Cara yang digunakan dalam penyampaian pendidikan politik agar menarik minat pemuda untuk mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan PAC Partai GERINDRA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ?
5. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik baik dari faktor internal dan faktor eksternal PAC Partai GERINDRA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

